



Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pelaporan Keuangan Koperasi: Studi Kasus di Kabupaten Bengkalis

Nurafida¹, Daspan Maulidin Sukma Putra², Susilawati³

STIE Syariah Bengkalis

Alamat: Sungai Alam, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28714

Korespondensi penulis: nurafidaazumar@gmail.com

Abstract. *The principle of transparency in financial reporting is an important element in good cooperative governance. This research aims to analyze the application of transparency principles in cooperative financial reporting in Bengkalis Regency. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews, observation and document analysis at several cooperatives in the area. The research results show that although cooperatives have attempted to implement transparency, there are still obstacles such as a lack of understanding by management about financial reporting and technological limitations. This study recommends training for administrators and members to increase cooperative financial management capacity.*

Keywords: *cooperatives, financial reporting, transparency,*

Abstrak. Prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola koperasi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan koperasi di Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen pada beberapa koperasi di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah berupaya menerapkan transparansi, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman pengurus tentang pelaporan keuangan dan keterbatasan teknologi. Studi ini merekomendasikan pelatihan bagi pengurus dan anggota untuk meningkatkan kapasitas manajemen keuangan koperasi.

Kata Kunci: *koperasi, pelaporan keuangan, transparansi,*

PENDAHULUAN

Koperasi memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di Indonesia yang memiliki basis ekonomi kerakyatan. Sebagai entitas ekonomi yang berlandaskan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, koperasi dituntut untuk menjaga kepercayaan anggotanya melalui tata kelola yang baik. Salah satu elemen penting dalam tata kelola koperasi adalah pelaporan keuangan yang transparan, yang tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga alat untuk menjaga akuntabilitas dan membangun kepercayaan di antara anggota (Akbar et al., 2021; Aminda et al., 2022; Mahmud et al., 2023).

Transparansi dalam pelaporan keuangan koperasi mencakup penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh anggota (Arindhawati & Utami, 2020; Arum et al., 2024; Budiati et al., 2020; Ningsih et al., 2022). Namun, pada praktiknya, banyak koperasi menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip ini. Beberapa kendala tersebut meliputi rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pengurus dan anggota, keterbatasan infrastruktur teknologi, hingga kurangnya pemahaman mengenai standar pelaporan keuangan. Hal ini

mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan koperasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi dan kepercayaan anggota.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak koperasi aktif. Koperasi di daerah ini berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya di sektor perdagangan, pertanian, dan usaha mikro. Namun, berdasarkan data awal, masih banyak koperasi di Bengkalis yang menghadapi tantangan dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Rendahnya transparansi tidak hanya memengaruhi hubungan internal koperasi, tetapi juga menurunkan daya tarik koperasi di mata investor atau mitra potensial.

Pelaporan keuangan yang tidak transparan dapat memunculkan berbagai masalah, seperti ketidakpercayaan anggota terhadap pengelolaan dana koperasi, rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi, hingga potensi pelanggaran hukum (Achmad & Misnaini, 2021; Agustina & Pratomo, 2019; Mahmud et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip transparansi telah diterapkan dalam pelaporan keuangan koperasi di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip transparansi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi koperasi.

Dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG), transparansi merupakan salah satu pilar utama. Penerapan transparansi tidak hanya memastikan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik di dalam koperasi (Ali & Saputra, 2023; Badawi, 2018; Novitasari, 2022; Putra & Putri, 2022). Oleh karena itu, studi ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana koperasi di Bengkalis mengintegrasikan prinsip transparansi sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi, baik secara praktis maupun akademis. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat membantu koperasi di Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan transparansi pelaporan keuangannya. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai tata kelola koperasi, khususnya dalam konteks penerapan prinsip transparansi di Indonesia. Dengan fokus pada penerapan prinsip transparansi, penelitian ini akan memberikan wawasan baru yang dapat mendukung pengelolaan koperasi di Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel.

KAJIAN TEORI

1. Prinsip Transparansi dalam Pelaporan Keuangan

Transparansi merupakan elemen kunci dalam tata kelola keuangan yang baik. Transparansi dalam pelaporan keuangan didefinisikan sebagai penyampaian informasi keuangan secara jujur, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, terutama anggota koperasi (Achmad & Misnaini, 2021; Arindhawati & Utami, 2020; Saputra & Fitriwati, 2023). Menurut Achmad & Misnaini, (2021) transparansi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi stakeholders melalui keterbukaan informasi. Dalam konteks koperasi, prinsip ini sangat penting karena anggota berperan ganda sebagai pemilik dan pengguna layanan koperasi, sehingga membutuhkan informasi yang komprehensif untuk pengambilan keputusan.

Kualitas transparansi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penerapan standar akuntansi, kemampuan pengurus dalam menyusun laporan keuangan, dan aksesibilitas

anggota terhadap informasi keuangan. Laporan keuangan yang transparan mencakup penyajian data yang tidak bias, relevan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2. Tata Kelola Koperasi Berdasarkan *Good Corporate Governance* (GCG)

Tata kelola koperasi yang baik bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) mencakup lima pilar utama, yaitu:

- a. **Transparansi:** Penyampaian informasi yang jelas dan dapat diakses oleh anggota.
- b. **Akuntabilitas:** Pertanggungjawaban pengurus atas segala kegiatan yang dilakukan.
- c. **Responsibilitas:** Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. **Independensi:** Pengelolaan koperasi yang bebas dari konflik kepentingan.
- e. **Keadilan:** Perlakuan yang setara terhadap semua anggota koperasi.

Dalam konteks koperasi, transparansi menjadi elemen utama untuk menciptakan hubungan saling percaya antara pengurus dan anggota. Menurut Aminy et al., (2021) koperasi yang menerapkan prinsip GCG cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik karena mampu menarik kepercayaan anggota dan mitra eksternal.

3. Standar Akuntansi Keuangan untuk Koperasi

Laporan keuangan koperasi di Indonesia umumnya disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP dirancang untuk memenuhi kebutuhan entitas kecil dan menengah, termasuk koperasi. Laporan keuangan ini meliputi:

- a. **Laporan Posisi Keuangan:** Menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi.
- b. **Laporan Laba Rugi:** Menunjukkan kinerja keuangan koperasi dalam suatu periode.
- c. **Laporan Arus Kas:** Memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas.
- d. **Catatan Atas Laporan Keuangan:** Menjelaskan informasi tambahan yang relevan.

Penerapan SAK ETAP memastikan laporan keuangan koperasi disusun secara standar, memudahkan evaluasi kinerja, dan mendukung transparansi informasi.

4. Hambatan dalam Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Beberapa studi sebelumnya mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penerapan transparansi pada koperasi. Menurut Rahayu & Dewi (2022) kendala utama meliputi:

- a. **Kurangnya Literasi Keuangan:** Banyak pengurus koperasi yang belum memahami konsep dasar akuntansi dan pelaporan keuangan.
- b. **Keterbatasan Teknologi:** Penggunaan teknologi yang minim menghambat efisiensi pelaporan keuangan.
- c. **Rendahnya Partisipasi Anggota:** Anggota kurang terlibat dalam memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat evaluasi kinerja koperasi.

Hambatan ini menuntut adanya intervensi strategis, seperti pelatihan pengurus dan penerapan teknologi akuntansi.

5. Relevansi Transparansi dengan Kepercayaan Anggota

Kepercayaan anggota merupakan elemen vital dalam keberlangsungan koperasi. Menurut Suci & Rohman, (2023) transparansi pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan anggota. Laporan keuangan yang transparan meningkatkan rasa percaya terhadap pengurus, sedangkan ketidakjelasan laporan keuangan dapat memicu konflik internal. Oleh karena itu, penerapan transparansi menjadi langkah strategis dalam menjaga loyalitas anggota dan mencegah kerugian reputasi koperasi.

6. Koperasi sebagai Entitas Ekonomi Kerakyatan

Koperasi di Indonesia memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Untuk mencapai tujuan ini, koperasi perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan.

Transparansi memungkinkan anggota untuk memahami kondisi keuangan koperasi, mengawasi kinerja pengurus, dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, prinsip transparansi tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mendukung keberlanjutan koperasi sebagai entitas ekonomi kerakyatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan penerapan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan koperasi di Kabupaten Bengkalis. Subjek penelitian adalah koperasi yang aktif di wilayah tersebut, dipilih secara purposif berdasarkan kriteria tertentu, seperti skala usaha dan ketersediaan data pelaporan keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi di Kabupaten Bengkalis telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Pengurus koperasi secara rutin menyusun laporan keuangan tahunan, yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini biasanya disampaikan dalam rapat anggota tahunan (RAT). Namun, tingkat pemahaman anggota terhadap laporan keuangan tersebut masih rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya upaya untuk menjelaskan laporan secara sederhana dan informatif.

Pada beberapa koperasi, laporan keuangan tidak sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Misalnya, tidak semua koperasi melampirkan catatan atas laporan keuangan, yang merupakan elemen penting dalam memberikan penjelasan rinci tentang angka-angka dalam laporan.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Transparansi

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama yang menghambat penerapan transparansi dalam pelaporan keuangan koperasi di Kabupaten Bengkalis:

- a. Kurangnya Literasi Akuntansi di Kalangan Pengurus

Sebagian besar pengurus koperasi tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Akibatnya, penyusunan laporan keuangan sering kali dilakukan tanpa pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip akuntansi yang benar. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang akurat dan sulit dipahami oleh anggota.

b. Keterbatasan Teknologi

Banyak koperasi masih menggunakan metode manual dalam pencatatan keuangan. Penggunaan teknologi, seperti software akuntansi, sangat terbatas karena biaya yang dianggap mahal atau kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan teknologi tersebut.

c. Partisipasi Anggota yang Rendah

Anggota koperasi cenderung kurang aktif dalam memanfaatkan informasi keuangan untuk mengevaluasi kinerja pengurus. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan di kalangan anggota, sehingga mereka tidak menyadari pentingnya transparansi pelaporan keuangan.

d. Keterbatasan Pendampingan dari Pemerintah atau Pihak Terkait

Dukungan dalam bentuk pelatihan atau pendampingan dari dinas terkait masih minim. Hal ini membuat koperasi kurang terpapar praktik-praktik tata kelola keuangan yang baik.

3. Upaya yang Telah Dilakukan oleh Koperasi

Beberapa koperasi telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan transparansi, seperti:

- a. Mengadakan pelatihan akuntansi dasar bagi pengurus.
- b. Memanfaatkan jasa konsultan untuk membantu penyusunan laporan keuangan.
- c. Meningkatkan keterlibatan anggota melalui penyampaian laporan keuangan dalam format yang lebih sederhana, seperti infografis atau tabel ringkas.

Namun, upaya ini belum dilakukan secara konsisten oleh semua koperasi, dan hasilnya masih bervariasi antar koperasi.

4. Implikasi Penerapan Transparansi

Penerapan transparansi yang baik berdampak positif pada kinerja koperasi, seperti meningkatnya kepercayaan anggota dan pihak eksternal, termasuk lembaga perbankan atau investor. Transparansi juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat pengurus karena mereka lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan.

Sebaliknya, kurangnya transparansi berpotensi menimbulkan konflik internal, seperti ketidakpercayaan anggota terhadap pengurus, rendahnya partisipasi dalam RAT, dan bahkan kerugian reputasi koperasi di mata masyarakat.

5. Analisis Berdasarkan Teori Good Corporate Governance (GCG)

Berdasarkan prinsip GCG, transparansi merupakan pilar penting dalam memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan koperasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam koperasi di Kabupaten Bengkalis masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tata kelola yang lebih baik. Misalnya, koperasi perlu mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan dan memfasilitasi akses anggota terhadap informasi keuangan secara real-time.

6. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan:

- a. Pelatihan Akuntansi dan Teknologi: Pemerintah daerah atau lembaga terkait dapat menyelenggarakan program pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar.

- b. Penerapan Teknologi Informasi: Koperasi disarankan untuk mulai menggunakan software akuntansi sederhana yang dapat mempermudah pencatatan dan penyajian laporan keuangan.
- c. Peningkatan Literasi Keuangan Anggota: Mengadakan edukasi bagi anggota koperasi mengenai pentingnya transparansi pelaporan keuangan agar mereka lebih memahami dan memanfaatkan informasi keuangan untuk kepentingan bersama.
- d. Pendampingan Berkelanjutan: Pihak dinas koperasi atau lembaga terkait dapat memberikan pendampingan secara berkala untuk membantu koperasi meningkatkan tata kelola keuangan mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan koperasi di Kabupaten Bengkalis masih berada pada kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman akuntansi di kalangan pengurus, minimnya penggunaan teknologi untuk mendukung pencatatan keuangan, dan rendahnya partisipasi anggota dalam pengawasan keuangan koperasi. Untuk meningkatkan transparansi, koperasi perlu memperkuat kompetensi pengurus melalui pelatihan akuntansi, memanfaatkan teknologi informasi keuangan berbasis digital, serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan anggota dalam proses pengelolaan keuangan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan anggota dan mendukung keberlanjutan koperasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, & Misnaini. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DUWET PANARUKAN SITUBONDO. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i2.45-58>
- Agustina, R. D., & Pratomo, D. (2019). Pengaruh fraud pentagon dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 44–62.
- Akbar, M. A., Misbahuddin, & Abd Wahab. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Perilaku Kewirausahaan Muslim Terhadap Kinerja Usaha Kecil (Studi Pada Usaha Kuliner Di Kota Makassar). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 25–39. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i1.551>
- Ali, H., & Saputra, F. (2023). Pengaruh Transparan, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 130–139.
- Aminda, R. S., Bimo, W. A., Marlina, A., Mahmud, K. S., & Handayani, T. (2022). Determinasi Akses Kredit Formal UMKM Sektor Makanan Minuman Masa Pandemi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 10(2).
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147. <https://doi.org/10.53512/valid.v18i2.181>
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Arum, F. D. M., Zakaria, A., & Anggraini, R. (2024). PENGARUH TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN FAKTOR INDIVIDUAL TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA KANTOR PUSAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2, 414–427.

- Badawi, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perbankan Indonesia (Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal Doktor Manajemen*, 1, 74–86.
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). PENGARUH GCG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>
- Mahmud, M. D. bin, Yamani, S., & Usman, N. (2023). PENDAMPINGAN PENATAAN CATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI DESA TAHANE. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.38918>
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>
- Novitasari, D. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(10), 1264–1289.
- Putra, M. T. S., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2022). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1317. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i05.p15>
- Rahayu, K. N. S., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2).
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA X. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1215>
- Suci, R. C. E., & Rohman, A. (2023). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN. 12, 1–10.